



IMPLEMENTASI PROGRAM STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK OLEH DINAS SOSIAL DI DESA SUKASARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

¹Dera Izar Hasanah, ²Pipih

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung,
Kabupaten Bandung

ziefanigabriela@yahoo.com

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung,
Kabupaten Bandung

pipihaja83@gmail.com

Received 21 September 2024; Revised: 24 September 2023; 25 September 2024; Published: September 2024; Available online: September 2023

ABSTRAK

LKSA Restu Ibu pernah menjadi salah satu Panti yang dikunjungi oleh Bapak Ridwan Kamil dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun Ananda Eril (Alm). Maka dari itu peneliti merujuk LKSA Restu Ibu di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori dari Teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011) dengan empat indikator yang digunakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sudah terlaksana dengan baik untuk komunikasi oleh dinas sosial Kabupaten Bandung kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Restu Ibu di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Pelaksanaan dalam sumberdaya untuk sarana dan prasarana sudah cukup baik, namun untuk segi anggaran masih belum baik karena masih mengandalkan akan pemberian dari donatur. Disposisi sudah cukup berjalan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan dan peran penting Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan pemerintah wilayah. Struktur birokrasi bisa berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama dengan para stakrholder dan mitra dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Restu Ibu di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk.

Key Word: Implementasi, Pengasuhan Anak, Dinas Sosial

PENDAHULUAN

Pembinaan terhadap anak terlantar telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta

sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa. Sebagai Negara yang berkeadilan sosial,

pemerintahan bertanggung jawab terhadap kondisi anak-anak terlantar, hal tersebut terdapat dalam pasal 34 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Realisasi dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut diupayakan bersama-sama antara Negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah melaksanakan usaha Kesejahteraan anak sebagai pembinaantunas bangsa dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menjamin pemeliharaan Kesejahteraan anak.

Anak dapat menerima hak haknya secara penuh dan melaksanakan kewajibannya yang bertanggung jawab dapat diperoleh dari bimbingan, pembinaan/asuhan yang intensif, terprogram dan berkesinambungan. Pada kenyataannya dalam kehidupan sosial di masyarakat dijumpai tidak semua keluarga yang mempunyai anak dapat menjaga, merawat, membina, dan mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama, dan norma sosial-budaya yang berlaku. Memang harus diakui bahwa ada banyak keluarga yang dapat menjaga dan

mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Namun sebaliknya, dijumpai pula ada keluarga yang tidak dapat menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Keluarga semacam ini biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, dan keluarga yang broken home.

Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap pembinaan anak Dengan demikian masa depan dan Kesejahteraan sosial anak terlantar diutamakan melalui pengasuhan dalam keluarga, sedangkan dalam pelayanan dan pembinaan melalui panti merupakan upaya terakhir apabila pengasuhan dalam keluarga tidak memungkinkan jadi pembinaan dan pelayanan sosial pemerintah hadir ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik Salah satu lembaga atau panti sosial anak dan Remaja yang aktif melakukan pembinaan dan pelayanan sosial kepada anak adalah Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Restu Ibu yang berada di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk saat ini mengurus anak yatim dan dhuafa, menurut data observasi awal di lapangan bahwa tahun

2024 sebanyak 53 anak yang terdiri dari 25 anak laki-laki dan 28 anak perempuan. Pembinaan akhlak dan Keterampilan merupakan program dari LKSA seperti Menyelenggarakan Kursus Kerajinan Tangan dan Usaha Kecil Panti (Sembako dan Produksi makanan) bagi penghuni dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Restu Ibu. Pembahasan tentang kualitas pengasuhan anak di LKSA atau Panti Asuhan Anak menunjukkan bahwa penerapan sepenuhnya dimulai dari peran penggati keluarga, pemenuhan aspek hak anak, menjaga dan melindungi anak yang memerlukan perlindungan. Demikian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Restu Ibu sudah mengikuti standar nasional pengasuh anak. Namun tanah dan bangunan yang di tempati oleh anak-anak LKSA Restu Ibu ternyata bukan, milik Yayasan yang harus di bayar sebesar 17 Juta kepada pemilik kontrakan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana program Kesejahteraan sosial anak ternyata secara aplikatif dihadapkan oleh berbagai hal sehingga belum mampu mengatasi persoalan anak secara efektif.

METODE

Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit". Studi kasus adalah strategi penelitian yang berfokus pada pemahaman dinamika hadir dalam pengaturan tunggal.

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan.

Dengan demikian, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subyek penelitian yang diamati serta akan diperoleh informasi dan data yang relevan untuk menjawab sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Sosial 30/Huk/2011 Standar

Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Terhadap Kesejahteraan Anak Di Desa Sukasari Kec Pamengpeuk Kab Bandung.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2012:144) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: "Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)". Objek dalam penelitian ini adalah Anak-anak di Desa Sukasari Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2006). Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang

akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat (J. Moleong, 2000).

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002).

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman & akbar, 2009).

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan,

kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian

dengan cara:

1. Perpanjangan
Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan (J. Moleong, 2000).

2. Ketekunan pengamatan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak (Sugiyono, 2006).

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2006).

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk

Kabupaten Bandung lebih khususnya Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan Maret-Agustus 2024.

PEMBAHASAN

Program standar nasional pengasuhan anak oleh Dinas Sosial mengacu pada Peraturan menteri sosial No. 30 Tahun 2011. Telah dijelaskan pada pasal 1 “Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak”. Dijelaskan juga pada pasal 2 “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak”. Serta pada pasal 3 yaitu “Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penentuan respon yang tepat bagi anak, pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial ini”.

Dalam hal ini Lembaga kesejahteraan sosial anak menjadi Lembaga yang harus bisa

Dera Izar Hasanah, Pipih: Implementasi Program Standar Nasional Pengasuh Anak oleh Dinas Sosial di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

menerapkan standar pengasuhan yang di canangkan oleh peraturan Menteri sosial No. 30 Tahun 2011. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah merupakan sebuah Lembaga yang menjadi pengganti kedua orangtua yang seharusnya menagsuh para anak-anak hidup dalam limpahan kasih sayang orangtua yang lengkap maupun dengan kelimpahan materi ekonomi yang tercukupi.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung pun menggunakan peraturan Menteri sosial No. 30 tahun 2011 dalam standar pengasuhan di Lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan kemudahan akses dalam pendaftaran LKSA di Kabupaten Bandung membuat Dinas Sosial Kabupaten Bandung lebih berinovasi dalam penyampaian bimibingan sosial agar LKSA yang di Kabupaten Bandung bisa benar-benar menjalankan standar pengasuhan dengan baik.

Tabel 1. Tabel Nama LKSA di Kabupaten Bandung

No	Nama Lksa	Kecamatan
1	Miftahul Khoir Assidiqiyah	Cangkuang
2	Al Kasyaf	Cileunyi
3	Baitul Ihsan	Ibun
4	Aqila Nur Azmi	Arjasari
5	Puteri Sartika	Margaasih
6	Muhammadiyah	Katapang
7	Rumpaka	Ciparay
8	Guru Bangsa	Cicalengka
9	Daarul Aitam Babusalam	Cimewan
10	Al Barokah	Banjaran
11	Aisyiyah	Rancaekek
12	Panti Yatim Baraya	Bale Endah
13	Al-Maun Center	Cicalengka

14	Anugrah	Paseh
15	Bina Yatim	Banjaran
16	Kasih Anak Indonesia	Pameungpek
17	Ulul Albab Al Faqih	Cimemyan
18	Assalam	Banjaran
19	Taman Anak Sejahtera (Tas)	Banjaran
20	Hikmah Mandiri	Bojong Soang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2024

Implementasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial Di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Implementasi Komunikasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial Di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dinas Sosial selalu ada kegiatan sosialisasi terkait standar pengasuhan anak kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Bidang Dayasos sebagai Pembina dari Lembaga LKSA tersebut dimana jumlah LKSA di Kabupaten Bandung 37 Lembaga Dari 31 Kecamatan

Kecamatan dan Desa berkolaborasi dengan pihak desa dalam sosialisasi tentang program standar pengasuhan anak khususnya di wilayah desa yang menjadi domisili sebuah LKSA.

Rencana dan penerapan dalam komunikasi tentang kebijakan pola asuh di LKSA kami mendapatkan informasi dari Dinas Sosial dan kami dari Lembaga mendapatkan bimbingan sosial seperti management, pola pengasuhan yang mengikuti permensos no 30 tahun 2011. Kemudian kami terapkan di LKSA.

Berdasarkan hasil dari proses wawancara bersama para informan tentang implementasi komunikasi program standar nasional pengasuhan anak oleh dinas sosial di desa sukasari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung menurut teori Edward adalah sudah terlaksana dengan baik untuk Komunikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Restu Ibu di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Implementasi Sumberdaya Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Alokasi yang dimiliki LKSA dalam mendukung pelaksanaan pengasuhan yaitu dari Donatur dan kadang dari hasil UMKM anak-anak, serta untuk hibah dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung pernah mendapatkan 1x pada tahun 2015.

jumlah staff di LKSA restu Ibu ada 8 orang mereka merupakan relawan yang sukarela menjadi bagian di LKSA restu ibu. Para staff tidak melihat seberapa yang mereka keluarkan dalam mengelola LKSA ini tapi memang benar-benar karena dorongan hati Nurani mereka sendiri.

para staff memiliki keterampilan Adanya program tahfidz Qur'an yang diberikan kepada anak-anak, kemudian program pemberdayaan untuk dakwah agar mereka diluar sana bisa berkembang jadi para staf pengajar dan pengelola LKSA.

Telah dijelaskan bahwa untuk sapsras bangunan yang ditempati masih bersifat sewa sebesar 17 juta pertahun dan sapsras memadai. Berdasarkan hasil dari proses wawancara Bersama para informan tentang Implementasi Sumberdaya Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial Di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk

Kabupaten Bandung menurut pada teori Edward pelaksanaan dalam sumberdaya untuk Sarana dan prasarana sudah cukup baik, namun untuk segi anggaran masih belum baik karena masih mengandalkan akan pemberian dari Donatur. Sebab dari Dinas Sosial hanya pernah memberikan dana hibah terakhir pada tahun 2015.

Implementasi Disposisi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial Di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Disposisi Program watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Implementasi disposisi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menunjukkan dinamika yang kompleks dan signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Berdasarkan teori Edward,

disposisi merujuk pada bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan melalui perilaku birokrasi dan aparat yang terlibat. Dalam kasus ini, disposisi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah berjalan dengan cukup baik, yang dapat diukur dari efektivitas kebijakan-kebijakan yang diterapkan serta peran penting yang dimainkan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah lokal.

Kebijakan pengasuhan anak yang mengacu pada standar nasional memiliki tujuan strategis dalam menjamin kesejahteraan anak melalui upaya pengasuhan yang terstruktur dan komprehensif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung menjadi krusial, karena mereka bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah pusat yang merancang kebijakan dan masyarakat lokal yang menjadi penerima manfaat.

Menurut teori implementasi Edward III, terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi efektivitas

implementasi kebijakan: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa disposisi, sebagai salah satu variabel kunci, telah berjalan baik di Kabupaten Bandung. Ini berarti, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, khususnya dari Dinas Sosial dan pemerintah wilayah setempat, memainkan peran sentral dalam mendorong keberhasilan program.

Kebijakan pengasuhan anak yang diimplementasikan ini tidak hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah wilayah dan Dinas Sosial sangat penting dalam membangun koordinasi serta memastikan bahwa sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat digunakan secara optimal. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pihak pelaksana kebijakan dan penerima manfaat juga merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa program pengasuhan

anak ini benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, implementasi disposisi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak di Desa Sukasari dapat dikategorikan berhasil, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal optimalisasi sumber daya dan peningkatan komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat lokal. Keterlibatan aktif dari semua pihak, baik Dinas Sosial maupun pemerintah lokal, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan anak dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai aktor merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif.

Implementasi Struktur Birokrasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak Oleh Dinas Sosial Di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi struktur birokrasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dapat dianalisis secara lebih mendalam menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Menurut teori ini, struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, bersama dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi merujuk pada bagaimana organisasi pemerintahan atau lembaga pelaksana kebijakan menyusun wewenang, tugas, dan tanggung jawab sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efisien dan efektif.

Dalam konteks implementasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak, struktur birokrasi yang baik memungkinkan aliran kebijakan dan perintah dari pusat hingga ke tingkat desa berjalan lancar. Hal ini juga mencakup kemampuan birokrasi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak,

termasuk para stakeholder dan mitra kerja. Salah satu contoh yang menonjol dalam implementasi program ini adalah kerjasama yang erat antara Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Restu Ibu yang berlokasi di Desa Sukasari. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa hanya bergantung pada birokrasi formal, melainkan juga pada keterlibatan mitra strategis yang memiliki peran dalam operasional di lapangan.

Kerjasama antara Dinas Sosial dan LKSA Restu Ibu memperkuat efektivitas struktur birokrasi melalui distribusi peran yang lebih baik. LKSA sebagai mitra membantu dalam penyediaan layanan yang langsung bersentuhan dengan anak-anak, sementara Dinas Sosial mengatur kebijakan, pengawasan, dan dukungan administrasi. Struktur birokrasi yang baik harus mampu menciptakan sinergi antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaan di lapangan, dan dalam hal ini, sinergi tersebut tampak jelas melalui kemitraan dengan LKSA.

Berdasarkan teori Edward, struktur birokrasi yang efektif juga harus fleksibel dan adaptif dalam merespons kebutuhan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Program pengasuhan anak di Desa Sukasari, meskipun diatur oleh standar nasional, harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Fleksibilitas ini tercermin dari bagaimana Dinas Sosial dan LKSA Restu Ibu berkolaborasi untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebutuhan spesifik komunitas setempat.

Selain itu, birokrasi yang efektif juga membutuhkan saluran komunikasi yang baik di semua tingkatan, baik antara Dinas Sosial dan LKSA, maupun antara birokrasi dengan masyarakat yang menjadi target kebijakan. Komunikasi yang efektif ini memungkinkan adanya penyampaian umpan balik yang lebih cepat dan tepat, sehingga kebijakan bisa diadaptasi jika diperlukan.

Dalam praktiknya, kerjasama dengan stakeholder seperti LKSA Restu Ibu bukan hanya memperlancar implementasi program, tetapi juga mengatasi keterbatasan sumber daya birokrasi. Seperti yang dinyatakan dalam teori Edward, sumber daya

merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi kebijakan, dan dengan adanya kolaborasi ini, sumber daya yang terbatas dapat dikelola lebih efektif, baik dari sisi tenaga kerja, finansial, maupun fasilitas pendukung program.

Secara keseluruhan, implementasi struktur birokrasi Program Standar Nasional Pengasuhan Anak di Desa Sukasari telah menunjukkan hasil yang positif, terutama karena dukungan dari mitra lokal seperti LKSA. Struktur birokrasi yang dibangun tidak hanya bergantung pada hierarki formal, tetapi juga pada jaringan kemitraan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program. Keterlibatan para stakeholder memungkinkan terjadinya distribusi peran yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam menjangkau masyarakat yang menjadi target kebijakan, khususnya anak-anak yang memerlukan pengasuhan sesuai standar nasional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang bersifat kompleks, seperti pengasuhan anak, memerlukan struktur birokrasi yang fleksibel, adaptif, dan

kolaboratif dengan berbagai aktor di lapangan.

PENUTUP

Setelah melaksanakan penelitian dengan judul implementasi komunikasi program standar nasional pengasuhan anak oleh dinas sosial di desa sukasari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung sudah berjalan dengan baik di lksa restu ibu desa sukasari kecamatan pameungpeuk bisa di simpulkan dinas sosial melalui bidang pemberdayaan sosial mensosialisasikan terhadap standar pengasuhanhanya kepada LKSA saja sebagai bentuk pemberdayaan menegemen dari menegemen LKSA tersebut.

Mengikuti teori implementasi Edwart dalam implementasi komunikasi program standar nasional pengasuhan anak oleh dinas sosial di desa sukasari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung

1. Sudah terlaksana dengan baik untuk komunikasi oleh dinas sosial kabupaten bandung kepada lembaga kesejahteraan sosial anak restu ibu di desa sukasari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung.
2. Pelaksanaan dalam sumberdaya untuk

sarana dan prasarana sudah cukup baik, namun untuk segi anggaran masih belum baik karena masih mengandalkan akan pemberian dari donatur.

3. Disposisi sudah cukup berjalan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan dan peran penting dinas sosial kabupaten bandung dan pemerintah wilayah.
4. Struktur birokrasi bisa berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama dengan para stakrholder dan mitra dari lembaga kesejahteraan sosial anak restu ibu di desa sukasari kecamatan pameungpeuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsul Yusuf L.N.
Perkembangan Peserta Didik (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada,2013)
- Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan) (Bandung: Mandar Maju,1995), Hlm.78-101
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2002, Cet.Xii), Hlm. 134.

- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm. 310.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.138.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2002, Cet.Xii), Hlm.149.
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 66
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009), Hlm. 85-89
- Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2002), Hlm. 248
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, Hlm. 272.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, Hlm. 273.
- Edwards Iii, George C. 2003, Implementing Public Policy, Jakarta
- Winarno 2005. Implementasi Kebijakan Model C G Edward Iii
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/Tinjauan-Teoritisimplementasi-Kebijakan-Model-C-G-Edward-Iii/>